

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN  
BERBASIS e-FAKTUR TERHADAP PENERIMAAN PPN  
(Studi Kasus Pada KPP Madya Jakarta Pusat)**

Oleh  
**<sup>1</sup>Kartika dan <sup>1</sup>Vika Aryanto**

***ABSTRACT***

This study aims to determine the effect of the Modernization of Tax Information System Based on e-Invoice to PPN Receipts. This research was conducted in KPP Madya Jakarta Pusat. The data used primary and secondary data. Data analysis used simple regression analysis. The result of the research shows that there is a positive and significant effect of of the Modernization of Tax Information System Based on e-Invoice to PPN Receipts in KPP Madya Jakarta Pusat.

**Keywords:** Modernization, Taxation, e-Invoice

## **I. PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.148.365.000.000 atau 77% penerimaan negara berasal dari pajak. Untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.310.219.000.000 atau 79% penerimaan negara berasal dari pajak (sumber : BPS, April 2014). Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa peranan pajak dalam pendapatan negara sangat penting.

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan data yang diperoleh dari DJP pada tahun 2009 - 2013 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor PPN mengalami kenaikan yang signifikan. Dari sebesar Rp193,07 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 384,72 triliun pada tahun 2013 ([www.ortag.org](http://www.ortag.org)).

Faktur pajak adalah sebuah dokumen yang sangat penting karena merupakan bukti otentik telah memungut PPN dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak, maka PKP dapat mengkreditkan atau mengurangi nilai PPN yang harus dibayar. Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, karena faktur pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli. Dengan demikian pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

Adanya peningkatan penerimaan PPN menunjukkan kesadaran Wajib Pajak, khususnya PKP, dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan, dalam hal ini PPN. Namun peningkatan penerimaan PPN tersebut dinilai belum efektif karena masih banyak ditemukan peredaran dan penggunaan faktur fiktif sehingga merugikan negara sebesar Rp1,5 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan penerimaan PPN 2015 mencapai sekitar Rp500 triliun. Selain itu, faktur pajak fiktif juga terjadi karena adanya penggunaan nomor faktur pajak ganda, faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang bukan PKP, serta banyaknya PKP yang tidak melaporkan faktur pajaknya sehingga menyebabkan realisasi penerimaan PPN hingga 20 Mei 2015 hanya Rp359,09 triliun, atau turun 2,77% dibanding periode sama tahun lalu ([www.bisnikeuangan.kompas.com](http://www.bisnikeuangan.kompas.com)). Karena faktur fiktif ini, nilai restitusi pajak menjadi besar sehingga membawa dampak pada penerimaan PPN.

Melalui *e-Faktur*, DJP berharap dapat mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain bagi PKP dapat menjalankan usahanya menjadi jauh lebih baik. *E-faktur* mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis

elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

Untuk menanggulangi masalah ini DJP membuat keputusan PER-16/PJ/2014 dan PMK-151/PMK.03/2013 yang mewajibkan PKP untuk menggunakan e-faktur dalam pelaporan pajaknya. *E-Faktur* akan memudahkan pemantauan faktur-faktur yang diterbitkan wajib pajak karena diharapkan sudah tersinkronisasi antara faktur yang dibuat dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN sehingga antara PKP yang menginput Pajak Masukan (PM) dan PKP Yang menginput Pajak Keluaran (PK) terkonfirmasi dengan jelas sehingga tidak ada lagi penggelapan pajak dan pembuatan serta penggunaan faktur fiktif. Penerapan *e-Faktur* diprediksi akan memperbaiki sistem PPN dan mengurangi restitusi yg tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Dengan ketentuan *e-Faktur*, diharapkan sebagai upaya pengamanan penerimaan pajak sekaligus membenahan administrasi perpajakan, khususnya sektor PPN. Hal ini sekaligus mengantisipasi dinamika bisnis dan perkembangan teknologi.

Uraian di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang mengambil judul Pengaruh Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis *E-Faktur* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek karena menggunakan kuesioner dalam memperoleh data dengan menggali opini, sikap dan pengalaman responden. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner tanpa melalui media perantara dan mengacu pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (angket). Data sekunder sebagai pelengkap dan pendukung berupa bukti catatan dan literatur dari instansi yang terkait.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Indriantoro dan Supomo (2012) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat. Penentuan sampel dilakukan dengan random sampling.

### **Uji Kualitas Data**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun memiliki validitas atau tidak, dan hasilnya ditunjukkan oleh suatu indeks yang menunjukkan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama (Indriantoro dan Supomo, 2012).

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari suatu residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan varians yang berbeda. Sedangkan uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak untuk menghindari terjadinya bias (Ghozali, 2011).

### **Metode Analisis**

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh modernisasi perpajakan terhadap penerimaan PPN. Dalam penelitian ini data penelitian akan diuji dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 20 for windows.

### III. HASIL PENELITIAN

#### Deskripsi Responden Penelitian

##### a. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Pengidentifikasi responden kuesioner berdasarkan usia dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pengelompokan usia, responden yang mendominasi berusia 31-40 tahun sebanyak 18 orang dengan presentase sebesar 48,6%.

Tabel 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
21-30	7	19,4%
31-40	18	50,0%
41-50	6	16,7%
>50	5	13,9%
Jumlah	36	100%

*Sumber: Data primer diolah*

##### b. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengidentifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat diringkas pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pengelompokan responden menurut jenis kelamin, dapat diketahui bahwa responden laki-laki mendominasi, yaitu sebanyak 22 orang dengan presentase sebesar 60%.

Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	22	61,1%
Perempuan	14	38,9%
Jumlah	36	100%

*Sumber: Data primer diolah*

##### c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pengidentifikasi responden berdasarkan pendidikan dapat diringkas pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pengelompokan responden menurut pendidikan, dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan sarjana sebanyak 26 orang

dengan persentase sebesar 72,2%, sisanya sebanyak 10 orang (27,8%) adalah yang berpendidikan diploma/SMA.

Tabel 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Sarjana	26	72,2%
Diploma/SMA	10	27,8%
Jumlah	36	100%

*Sumber: Data primer yang diolah*

### Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Reliabilitas)

Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur ( $X_1$ ) dan Penerimaan PPN ( $X_2$ ) dengan menggunakan bantuan *software SPSS ver 20.0 for Windows*:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel  $X_1$

Item	$r_{hitung}$	r tabel	Ket.
1	0.5332	0.444	Valid
2	0.5483	0.444	Valid
3	0.5335	0.444	Valid
4	0.6751	0.444	Valid
5	0.6702	0.444	Valid
6	0.7424	0.444	Valid
7	0.7107	0.444	Valid
8	0.7920	0.444	Valid
9	0.5223	0.444	Valid
10	0.6104	0.444	Valid

*Sumber: Hasil pengolahan SPSS*

Dari tabel di atas terbukti bahwa ( $r_{hitung} > r_{tabel}$  0,444) untuk setiap kuesioner pada variable Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur ( $X_1$ ) Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner untuk variabel  $X_1$  tersebut dinyatakan valid. Tabel berikut ini menampilkan hasil uji reliabilitas variabel Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur ( $X_1$ ) :

Tabel.5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel  $X_1$

<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Jumlah Item</b>
0.841	10

Dari tabel di atas terbukti bahwa nilai  $\text{Alpha} > \text{Alpha}_{table}$  (0,7). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variable Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur ( $X_1$ ) dinyatakan reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Y

<b>Item</b>	<b><math>r_{hitung}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Ket.</b>
1	0.5462	.444	Valid
2	0.5193	.444	Valid
3	0.5785	.444	Valid
4	0.6341	.444	Valid
5	0.6542	.444	Valid
6	0.7134	.444	Valid
7	0.7261	.444	Valid
8	0.7592	.444	Valid
9	0.5864	.444	Valid
10	0.6601	.444	Valid

*Sumber : Hasil pengolahan SPSS*

Dari tabel di atas terbukti bahwa ( $r_{hitung} > r_{tabel}$  0,444) untuk setiap kuesioner pada variabel Modernisasi Sistem Informasi Penerimaan PPN (Y) Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner untuk variabel Y tersebut dinyatakan valid. Tabel berikut ini menampilkan hasil uji reliabilitas variabel Penerimaan PPN (Y) :

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0.836	10

### Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), model harus diuji terlebih dahulu dengan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

#### a. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant) Modernisasi SI Berbasis e-Faktor	.974	1.027

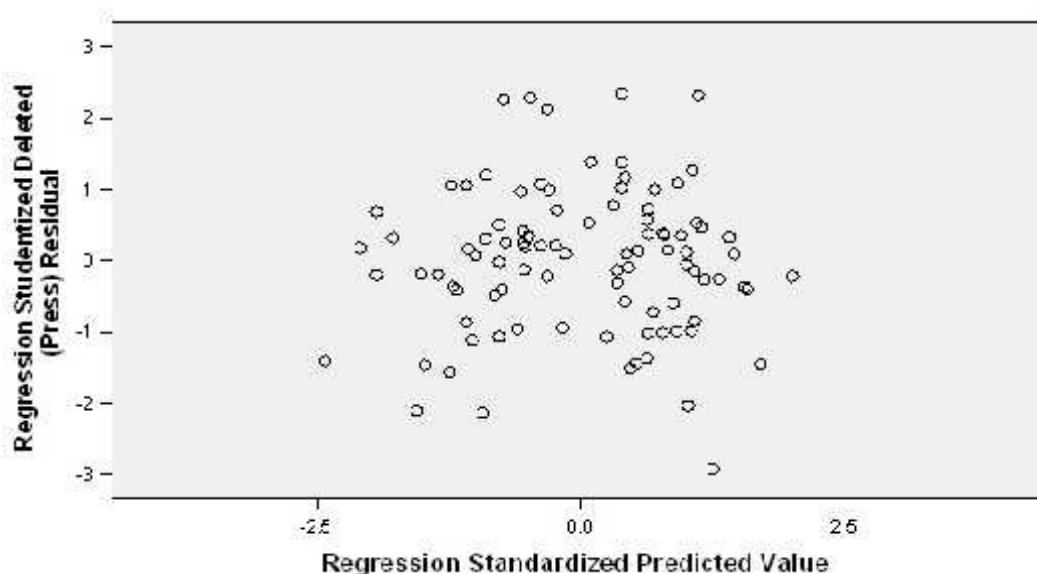
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai VIF untuk Modernisasi Sistem Informasi Berbasis e-Faktor nilai tolerance juga mendekati 1, yaitu 0,974, dengan demikian persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

#### b. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas terlihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 1. Grafik Scater Plot Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model layak digunakan (Priyatno, 2012).

### c. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984(a)	.967	.966	836705.824	1.400

a. Predictors: (Constant), E-Faktur

b. Dependent Variable ; Penerimaan PPN

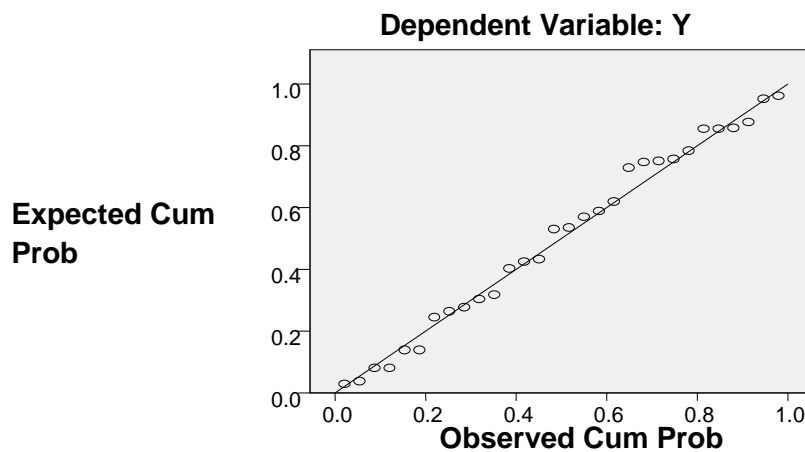
Sumber : Pengolahan Data, 2016

Hasil D-W di atas menunjukkan angka 1,400 berarti berada di antara -2 dan +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada hubungan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur dengan Penerimaan PPN.

#### d. Uji Normalitas

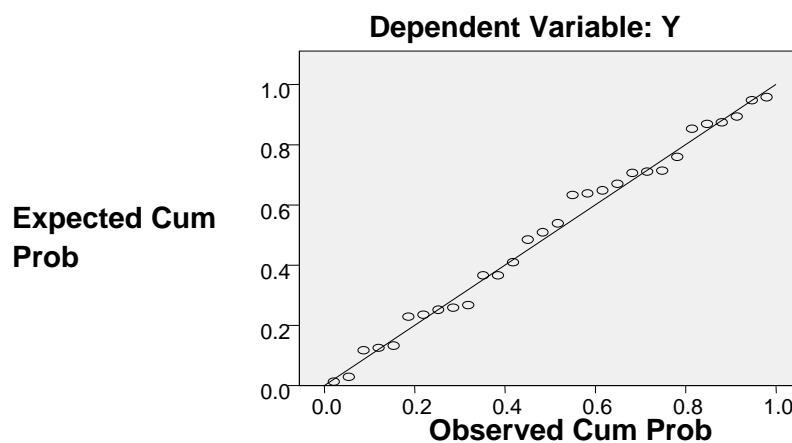
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan normal probability plot. Pedoman suatu model dikatakan terdistribusi normal jika nilai-nilai sebaran terletak di sekitar garis lurus diagonal. Gambar-gambar di bawah ini akan menunjukkan hasil uji normalitas e-Faktor terhadap Penerimaan PPN, Kepatuhan PKP sebagai variabel intervening terhadap Penerimaan PPN. Dari gambar-gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa sebaran data terdistribusi normal karena data berada di sepanjang garis lurus diagonal yang merupakan syarat normalitas.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Gambar 2. Grafik Normal Plot e-Faktor

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3. Grafik Normal Plot Penerimaan PPN

### Uji Hipotesis

Menguji pengaruh Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur terhadap Penerimaan PPN. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 10. Koefisien dan Uji Hipotesis

Model Summary

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.675	2.118		4.052	0.021
E-Faktur	0.167	0.092	0.032	2.822	0.009

- a. Predictors: (Constant), e-Faktur
- b. Dependent Variable

Sumber : Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai sig <0,05 dan nilai beta positif dapat diartikan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya modernisasi sistem perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya salah satu bentuk modernisasi perpajakan dengan menggunakan e faktur, wajib pajak merasa terbantu, nyaman dan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Berbasis e-Faktur terhadap Penerimaan PPN Madya Jakarta Pusat. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi e-Faktur yang dibuat oleh DJP dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Madya Jakarta Pusat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya di bidang PPN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariat Dengan Menggunakan SPSS Edisi Tiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro dan Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.
- Priyatno, D. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
- [www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com). Diakses tanggal 18 Januari 2017.
- [www.ortag.org](http://www.ortag.org). di akses tanggal 18 Januari 2017.